KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Muhaimin: Saya Butuh 10 Persen Dukungan Partai Lain
Tanggal : Sabtu, 05 Februari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Muhaimin: Saya Butuh 10 Persen Dukungan Partai Lain

NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, siap maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, PKB masih membutuhkan 10 persen suara untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* sebesar 20 persen.

"Saya *kan* hanya punya modal 10 persen, saya butuh 10 persen lagi dari partai lain," ujar Muhaimin di Kampung Nelayan Kalibaru, Cilincing, Jakarta, Jumat (4/2).

PKB memperoleh suara sebesar 9,69 persen pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, sedangkan syarat pencapresan sebesar 20 persen. "Yang penting kita jalan dulu, kita lihat komunikasi coba pembicaraan dengan partai-partai. Semua kita diskusikan, semua kita ajak bicara," ujar Muhaimin.

Muhaimin juga optimistis bahwa elektabilitasnya akan meningkat dalam kurun waktu dua tahun ke depan meski berbagai lembaga survei menyebutkan bahwa elektabilitasnya tidak lebih dari tiga persen. "Kami memang baru mulai, tentu kami akan lihat tiga sampai empat bulan yang akan datang," kata Muhaimin.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu PKB Jazilul Fawaid memprediksi bakal ada tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Ia mengatakan, PKB akan berupaya memimpin salah satu poros itu.

"Dengan melakukan upaya-upaya dengan terbentuknya poros lebih banyak minimal tiga poros dan PKB berupaya untuk memimpin satu poros," ujar Jazilul.

Untuk saat ini, mayoritas kader PKB berikhtiar untuk mengusung sang ketua umum partai, Muhaimin sebagai capres di 2024. Namun, partainya realistis bahwa pencalonannya membutuhkan suara partai lain untuk menyanggupi syarat *presidential threshold* sebesar 20 persen.

"PKB punya modal sembilan sampai 10 persen, tentu kalau koalisi dengan parpol menengah bawah, kita harus mengajak dua parpol lagi," ujar Jazilul.

Hapus *threshold*

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* sebaiknya dihapus. "Pilihan menghapus ambang batas pencalonan presiden lebih bijaksana untuk diambil guna meredam potensi dan residu keterbelahan di masyarakat," kata Titi.

Titi mengatakan, pilihan itu lebih bijak dibandingkan mempersingkat durasi kampanye. "Masa kampanye ini sebenarnya hilirnya saja. Ada hulunya yang lebih strategis untuk diambil langkah-langkah terobosan oleh pembuat undang-undang dan pembuat keputusan," kata dia.

Apabila para pembuat keputusan mempersingkat masa kampanye, menuju masa kampanye pemilu, KPU dan Pemerintah harus memfasilitasi sosialisasi pemilu secara berimbang agar tidak terjadi kampanye di luar jadwal.

KPU telah menawarkan durasi kampanye untuk Pemilu 2024, yakni selama 120 hari. Durasi tersebut telah jauh lebih pendek dari masa kampanye pemilihan legislatif 2009 (sembilan bulan), pemilihan legislatif 2014 (15 bulan), dan Pemilu Serentak 2019 (enam bulan).

antara **ed:** ratna puspita